

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI
OLEH PT. KERETA API INDONESIA DI KOTA PADANG PANJANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

TESIS



Disusun oleh:

YOKO VANESSA

2120122047

Dosen Pembimbing:

Prof.Dr.Zefrizal Nurdin,SH.,MH (Pembimbng I)

Dr. Hengki Andora,SH.,LLM (Pembimbing II)

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI
OLEH PT. KERETA API INDONESIA DI KOTA PADANG PANJANG**

Yoko Vanessa, 2120122047, Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024.

ABSTRAK

Beberapa tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang tidak difungsikan lagi secara optimal, dikarenakan sebagian rel-rel kereta api tersebut telah tertimbun oleh bangunan masyarakat sekitar mengakibatkan sebagian tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) banyak yang telah digunakan oleh masyarakat disekitarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia untuk melindungi hak-hak atas tanah di Padang Panjang 2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia dalam melindungi hak-hak atas tanah di Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil Penelitian adalah Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia upaya yang dilakukan oleh PT. KAI dalam melindungi aset-asetnya yang berupa tanah baik sudah disertifikatkan maupun belum disertifikatkan ada 3 cara yang dilakukan yaitu 1. Sertikasi, 2. Penandaan, 3. Pemasangan Pelang Di Pelang tersebut disebutkan luas tanahnya. Adapun perlindungan hukumnya terbagi atas 2 yakni, perlindungan hukum presentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum presentif berupa adanya perjanjian sewa-menyewa, sedangkan perlindungan hukum represif belum terjadi di padang panjang karena belum adanya tindakan dari PT. KAI. Kendala yang dihadapi oleh pihak PT. KAI Divre II Sumbar yaitu pengumpulan waktu yang harus pas dan anggaran dari KAI pusat. Untuk menanggulangnya dilakukan perikatan dengan orang yang memanfaatkan agar tidak diserobot atau dimiliki secara ilegal Adanya kepadatan bangunan yang berada di sempadan rel kereta api, hal tersebut berdampak menyulitkan pihak PT. KAI untuk melakukan penertiban atau pengosongan lahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kereta Api Indonesia, Hak Atas Tanah

LEGAL PROTECTION OF LAND RIGHTS CONTROLLED BY PT. KERETA API INDONESIA IN PADANG PANJANG CITY.

*Yoko Vanessa, 2120122047, Master of Notary Law,
Faculty of Law, Andalas University, 2024.*

ABSTRACT

There are several land assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) located in Guguk Malintang Village, Padang Panjang Timur District, Padang Panjang City that are no longer optimally used, because some of the railroad tracks have been buried by buildings from the surrounding community, resulting in some of the land assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) being controlled by the surrounding community. The formulation of the problem in this study is: 1. How are the efforts to protect legal rights to land controlled by PT. Kereta Api Indonesia to protect land rights in West Sumatra 2. What are the obstacles faced by PT. Kereta Api Indonesia in protecting land rights in West Sumatra This study uses an empirical legal method, using secondary data and primary data, while the data collection tool in this study uses interviews. The results of the study are Legal protection provided by PT Kereta Api Indonesia efforts made by PT. KAI in protecting its assets in the form of land, whether certified or not, there are 3 ways to do it, namely 1. Marking, marking is done by the asset guard team, 2. in the form of installing stakes, with KAI logo stakes. There are various logos for these stakes, starting from the Dutch era, It is in the form of rails. 3. Installation of Signs The area of land is stated on the Sign The obstacles faced by PT. KAI Divre II Sumbar are the collection of time that must be right and the budget from the central KAI. To overcome this, an agreement is made with the person who uses it so that it is not seized or owned illegally. The density of buildings on the railroad tracks, this has an impact on making it difficult for PT. KAI to carry out land control or eviction. More space is needed for the demolition of buildings on the very dense railroad border so as not to interfere with the passing trains. b. Lack of legal awareness of residents living on the railroad border.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Railways, Land Rights*